

Insentif Langsung Tak Dirasakan

Dimulai 1995, program penilaian kinerja perusahaan di bidang lingkungan hidup atau Proper dinilai belum memberikan insentif langsung bagi perusahaan dengan penilaian emas dan hijau. Pemerintah diminta menciptakan mekanisme insentif nyata agar Proper menjadi kebutuhan bagi perusahaan.

"Kami mengusulkan ada insentif kemudahan perizinan lingkungan dan pajak bagi peraih emas dan hijau," kata Manajer Departemen Lingkungan PT Medco E&P Indonesia Ibrahim Arsyad pada temu media yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, Kamis (27/11). Program Proper bertujuan mendukung praktik bisnis minim dampak buruk bagi lingkungan.

Predikat hijau berarti praktik bisnis memenuhi kaidah sesuai perundang-undangan. Predikat emas bagi perusahaan dengan tiga kali hijau berturut-turut.

Menurut Ibrahim, Proper hijau dan emas meningkatkan citra positif perusahaan. Sebaliknya, buruk bagi merah dan hitam.

Namun, dari sisi manfaat langsung bagi peraih Proper emas dan hijau, belum berbeda dengan peraih predikat lain. Itulah kemudian muncul harapan ada insentif langsung.

Ditemui terpisah, Sigit Reliantoro, Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi, dan Migas Kementerian LH dan Kehutanan yang juga Ketua Sekretariat Proper mengatakan, mekanisme insentif pajak butuh kerja sama dengan Kementerian Keuangan. "Kami baru mendapat informasi kalau hal ini (insentif pajak) sudah ada di Kementerian Keuangan. Kami coba komunikasikan untuk detail mekanismenya," katanya.

Menurut Ketua Dewan Proper Sudharto P Hadi, pendekatan kombinasi insentif-disinsentif dan pengawasan berperan menjaga keselarasan ekologi dan ekonomi. "Proper berupaya menjadikan kepatuhan itu sebagai kebutuhan perusahaan," tuturnya. Melalui insentif yang tepat, kepatuhan sebagai kebutuhan itu diharapkan terwujud.

Tahun ini, penghargaan Proper 2014 diberikan pada 2 Desember 2014 oleh Wakil Presiden. Jumlah peserta ada 1.908 perusahaan yang terdiri atas 1.094 perusahaan (diusulkan provinsi melalui Dana Dekonsentrasi), 601 perusahaan hasil penilaian mandiri, dan 213 perusahaan yang diawasi langsung Kementerian LHK.